PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

UNIT KERJA : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **485014**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/146.25 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , WARISAN Rp. 1.115.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 141.550.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/KIJANG INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA NF100/SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 950.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
4. MOTOR, HONDA A5C02R37M2 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
5. MOTOR, HONDA H1B02N42LO AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
6. MOTOR, HONDA H1B02N41LO AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 130.359.674**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.671.909.674**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.671.909.674**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.